

INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PASURUAN

by Jul Suriadi

Submission date: 17-Mar-2020 11:54PM (UTC+0800)

Submission ID: 1277061303

File name: NGUTAN_PBB-P2_SEBAGAI_UPAYA_MENINGKATKAN_PAD_KAB.PASURUAN-1.docx (24.27K)

Word count: 741

Character count: 4935

1
**INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN PASURUAN**

RINGKASAN

Diberrlakukanya Undang-Undang (UU) Nomorr 28 Thun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bearti seluru kwenangan daalam hall pemngutan Pajaak Daeirah sepenuhnyaa dialihkan kepda Pemerintah Daerah, menjadikan pengumpulan peemungutan Pajak Bmi dan Bagunan Pedesaan dann Pekotaan (PBB-P2) berada dibawah wewenang Pemmerintah Daerah. Oleh karena itu, perlu adanya kerja yang maksimal untuk mecapai bahkan meningkatkan realisasi target penerimaan pajak, terlebih khusus Pajak Buumi dan Bagunan Perdesaan dan Pekotaan (PBB-P2). Keadaan ini akan mendorong pihak pmerintah untuk lebih mengeksplorasi potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor PBB-P2 dii daerahnyaa. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif dngan pendekatan kualitatif serta analisis data dilkukan dengan reeduksi data, penyazian daata dan penarikan kesmpulan. Haasil pnelitian menunjukan bahwa beberapa upaya intensifikasi pemungutan PBB-P2 sudah berjalan dengan baik, meskipun masih belum 100% maksimal. Kontibusi PBB P2 dari thun 2014 sampai dngan 2018 menunjukan bahwa kontibusi PBB P2 terhadap pendapataan daerah selalu meningkat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan terbesar yang meliputi pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Siahaan (2010 : 9) Pajak pusat ialah pajak yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat dengan Undang-Undang (UU), yang memiliki wewenang dalam pemungutan pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Sedangkan pajak daerah menurut Mardiasmo (2011 : 12) ialah sumbangan wajib kepada daerah yang tetang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat mewajibkan berdasarkan Undang-Undang (UU), dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta dipergunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kenyamanan rakyat.

Dibelakukanya Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berarti seluruh kewenangan dalam hal pemungutan Pajak Daerah sepenuhnya dialihkan kepada Pemerintah Daerah (PEMDA). Belakunya Undang-Undang (UU) untuk menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah yang diharapkan mampu menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial untuk setiap daerah. Kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan PBB-P2 menjadi milik Pemerintah Daerah (PEMDA), meliputi proses pendaftaran, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan terkait PBB P2.

Pemrintah Daerah (PEMDA) untuk tiap tahunya memiliki taget dalam penerimaan PBB-P2 sbagai salaah satu sumbeer pndapatan daierah, tapi terkadang reaalisasi pnerimaan pajak tdak ssuai dngan taget yang teelah diteetapkan oleh PEMDA, sehinga perlu adanya stategi yang kusus utuk mencapai serta meniingkatkan realsasi taget penerimaan pajak kususny tetang PBB P2. Hal tesebut akaan memotivasi PEMDA untuk lebih mengali poteensi peneriimaan PAD dri sektor PBB P2 di daeirahnya.

Kabupaten Pasuruan mrupakan salh satu darii berapa kota/kabupaten daerah tingkat II yng ada di Jawa Timur yangg sudah melaksanakan pegalihan PBB-P2 sejaak thun 2013. Stelah melakuukan pngalihan PBBP2, Kabupaten Pasuruan mlalui Diinas Pedapatan dan Pegelolaan Keeuangan Kabupaten Pasuruan melakukaan semua kgiatan pepajakan tekait teentang PBB P2.

Upaaya yng dpat dilaakukan oleh DPPK Kabupaten Pasuruan agar pmungutan PBBP2 dpat dioptimalkan sbagai sumber Pendapatan Asli Daerah, dngan melakkan intesifikasi pmungutan PBB P2. Bedasarkan (Surat Edarn Direektur Jenderal Paajak Nomor SE.06/Pj.9/2001) tetang penerapan ekstesifikasi wajib pajak serta itensifikasi pajak. Intensifikasi adalah aktivitas optimalisasi pengalihan pendapatan paajak atas oobjek dan subjekk pjak yng sudah tercatat atau tedaftar pada adminisstrasi DJP, daan dri hsil penerapan ektensifikasi wajib pajak. Intesifikasi pajaak bertujuan untuk megintensifkan smua usahnya dalaam menigkatkan penrimaan pajak. Bedasarkan uraian di ats, akaan dilaksnakan penlitian lbih lannjut ntang intesifikasi pmungutan PBBP2 sebagai upaya meningkatkan PAD. Juudul yg diangkat dlam pnelitian ini adlah : **Intesifikasi**

**Pemuungutan Pajak Bumi dan Bagunan Pedesaan dan Pekotaan (PBB-P2)
sebagai Upaya Meningkatkan Pedapatan Asli Daaerah Kabupaten Pasuruan.**

1.2. Rumusan Masalah

Dari laatar belakang masalah yng tlah duraikan, maka dapat dirumuskan msalah utama dalam prelitian ini aadalah “ Bgaimana intensifikasi pemungutan Paajak Bumi dan Bagunan Pedesaan dan Pekotaan (PBBP2) sebagai upaya meningkatkan Pndapatan Asli Daaerah di Kabupaten Pasuruan ? “

1.3. Tujuan penelitian

Penlitian ini betujuan untuk mennjawab pemasalahan sebgaimana yang tlah diruumuskan pda peumusan msalah di atas, yaitu utuk menganalisis intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bagunan Pedesaan dan Pekotaan (PBBP2) sebagai upaya meningkatkan Pedapatan Assli Daierah di Kabupaten Pasuruan.

1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat akademik

Medapatkan data dan faakta yng shih mngenai pngaruh PBB-P2 terhadap peninggkatan Pedapatan Derah Kbupaten Pasuruan.

2. Manfat Praktis

- a. Menambaaah pebendaharaan refeerensi diperpustakaan UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG.

- b. Mrupakan sumber reeferensi baagi program studi akuntansi, yang akan meneliti lebih lanjut mengenai ⁴intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bngunan Pedesaan dan Pekotaan sebagai upaya dalam mningkatkan Pndapatan Asli Daaerah Kabupaten Pasuruan untuk penentu kebijakan di msa medatang.

INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PASURUAN

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	2%
2	docplayer.info Internet Source	2%
3	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PASURUAN

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5
